



Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan Mangrove (Studi Kasus di Pantai Litianak Desa Holulai, Kec Loaholu, Kab Rote Ndao)

Yemima Ingamita^{1*}, Alfred Omri Ena Mau², Syahrin Badrin Kamahi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Korespondensi penulis: ingamitayemima@gmail.com

Abstrack: *The mangrove forest at Litianak Beach, Holulai Village, Loaholu Subdistrict, Rote Ndao Regency, is a coastal ecosystem with high ecological and economic value. However, this area faces various challenges, including land conversion, overexploitation, and low community awareness of the importance of mangrove ecosystem conservation. This study aims to analyze the role of local institutions in the management of mangrove forest natural resources using a qualitative approach through field research methods. The research focuses on four key institutional aspects: context, structure, behavior, and performance. The findings indicate that mangrove management in Litianak Beach involves synergy between the village government, Village-Owned Enterprises (BUMDes), the Welaleo customary group, and the local community. This institutional structure has proven effective in raising public awareness and reducing illegal logging activities through customary regulations such as Papadak. However, challenges such as economic pressures, tourist waste, and uncertain access to mangrove resources remain obstacles that need to be addressed. The performance of the management shows positive results, marked by increasing community participation in conservation efforts and the development of sustainable mangrove resource utilization. This study highlights the importance of a participatory and culturally rooted local institutional approach in sustaining the mangrove ecosystem while improving the welfare of coastal communities. Strengthening institutional capacity and providing intensive environmental education are essential to ensure more effective and sustainable mangrove management in the future.*

Keywords: *Coastal Ecosystem, Community-Based Conservation, Holulai Village, Local Institutions, Mangrove*

Abstrak: Hutan mangrove di Pantai Litianak, Desa Holulai, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian ekosistem mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam hutan mangrove melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji pengelolaan mangrove berdasarkan empat aspek kelembagaan: situasi (*context*), struktur (*structure*), perilaku (*behavior*), dan kinerja (*performance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan mangrove di Pantai Litianak melibatkan sinergi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok adat Welaleo, dan masyarakat setempat. Struktur kelembagaan ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta menekan aktivitas penebangan liar melalui kebijakan adat seperti Papadak. Kinerja pengelolaan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan mulai berkembangnya pemanfaatan hasil mangrove secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kelembagaan lokal yang partisipatif dan berbasis nilai-nilai budaya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Ke depan, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan serta edukasi lingkungan secara intensif agar pengelolaan mangrove dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekosistem Pesisir, Konservasi Berbasis Masyarakat, Desa Holulai, Lembaga Lokal, Mangrove

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Hutan mangrove di Pantai Litianak, Desa Holulai, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki potensi besar baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Kawasan ini memiliki luas sekitar 7 hektar dan dihiasi dengan tumbuhan mangrove yang tumbuh subur. Keberadaan hutan mangrove sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, seperti melindungi pantai dari abrasi, sebagai tempat hidup berbagai spesies laut, serta berfungsi sebagai penampung karbon yang sangat berguna dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, meskipun memiliki potensi besar, kawasan hutan mangrove di Pantai Litianak menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengancam kelestariannya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah alih fungsi lahan yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Beberapa masyarakat pesisir, yang sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, dan penyadap nira lontar, memanfaatkan hutan mangrove untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kayu bakar (Sirilius 2019).

Selain itu, ada juga masyarakat yang menebang hutan mangrove untuk membuka lahan, yang digunakan untuk menjemur ikan dan rumput laut. Aktivitas-aktivitas ini, meskipun memberikan manfaat ekonomi, berpotensi menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem mangrove jika tidak dikelola dengan bijaksana. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadi faktor utama yang mengancam keberlanjutan hutan mangrove Litianak. Sementara itu, faktor ekonomi lokal juga menjadi pendorong utama eksploitasi hutan mangrove di daerah tersebut. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan mangrove dan sumber daya alam pesisir lainnya, yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap ekosistem tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat ekosistem mangrove memperburuk masalah ini. Dianawati, (Suratman, & Hardoyo 2014),

Banyak masyarakat Desa Holulai yang belum sepenuhnya memahami pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan mereka. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan hidup masyarakat itu sendiri. Kegiatan sosialisasi yang terencana dan partisipatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove, serta

mengintegrasikan pengelolaan yang berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi lokal. Tanpa upaya bersama yang terkoordinasi, hutan mangrove di Desa Holulai berisiko semakin terdegradasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir itu sendiri. (Setiadi & Rahmawati 2021)

Dengan kondisi ini, sangat penting adanya pendekatan kelembagaan lokal yang dapat mengelola dan melestarikan hutan mangrove di Pantai Litianak, yang melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah kabupaten. melalui empat aspek utama: **situasi, struktur, perilaku, dan kinerja** dalam pengelolaan Hutan mangrove di Pantai litianak Desa Holulai .

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kelembagaan lokal dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Pantai Litianak, Desa Holulai, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan Hutan Mangrove

Teori pengelolaan sumber daya alam yang dianalisis melalui empat aspek utama: situasi, struktur, perilaku, dan kinerja sering kali dikaitkan dengan Teori Kelembagaan yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom(1990), seorang ahli dalam studi pengelolaan sumber daya alam dan kelembagaan.

Ostrom mengemukakan kerangka kerja yang mendalam tentang bagaimana masyarakat dan lembaga dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pendekatan *Institutional Analysis and Development (IAD)*. Dalam kerangka ini, dia mengidentifikasi beberapa elemen yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, termasuk konteks (situasi), struktur organisasi (struktur), perilaku aktor (perilaku), dan hasil atau kinerja pengelolaan (kinerja). Namun, konsep empat aspek ini (situasi, struktur, perilaku, kinerja) lebih sering dipakai sebagai komponen utama dalam analisis kelembagaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Elinor Ostrom mempelopori pemahaman tentang bagaimana lembaga lokal dan aturan yang dibentuk masyarakat dapat memengaruhi hasil pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan mangrove. Ostrom mengembangkan konsep ini dalam karya-karya terkenalnya, seperti "Governing the Commons" (1990), di mana ia menganalisis bagaimana masyarakat dapat mengelola sumber daya alam bersama-sama tanpa

memerlukan intervensi pemerintah atau kepemilikan pribadi yang ketat. Dalam kerangka ini, situasi, struktur, perilaku, dan kinerja adalah elemen-elemen penting yang membentuk proses pengelolaan bersama.

Pengelolaan hutan mangrove, sebagai salah satu ekosistem pesisir yang sangat penting, memerlukan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Dalam konteks teori pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan hutan mangrove dapat dianalisis melalui empat aspek utama: situasi, struktur, perilaku, dan kinerja. Keempat aspek ini menggambarkan dinamika yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove dan bagaimana interaksi antar aktor dan elemen-elemen dalam sistem tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan. Penjelasan Aspek dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam:

- a. Situasi (*Context*): Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam.
- b. Struktur (*Structure*): Organisasi, aturan, dan sistem kelembagaan yang mengatur penggunaan sumber daya.
- c. Perilaku (*Behavior*): Tindakan individu atau kelompok dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.
- d. Kinerja (*Performance*): Hasil dari pengelolaan yang diukur melalui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (di Pantai Litianak Desa Holulai, Kecamatan Loaholu oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao). Teknik Penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian yang berjenis kualitatif ini ialah Purposive Sampling. Penelitian ini akan dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak-pihak tertentu di lokasi penelitian untuk memberikan data atau sumber terhadap topik yang ada, informan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Camat Loaholu; (2) Badan kesatuan pengelolaan hutan; (3) Kepala Desa Loaholu; (4) Tokoh Adat; (5). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik pengumpulan data diantaranya : Observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN

Pengelolaan hutan mangrove di Pantai Litianak menunjukkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan mangrove di Pantai Litianak telah mengalami perbaikan berkat upaya bersama masyarakat dan pemerintah. Namun, tantangan seperti kerusakan ekosistem akibat sampah wisatawan dan binatang yang dilepas sembarangan masih menjadi hambatan signifikan.

Situasi (*context*) Kondisi ekologis di Pantai Litianak menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Upaya restorasi mangrove dan pengelolaan yang lebih baik telah berhasil memperbaiki kualitas ekosistem. Namun, ancaman dari sampah wisatawan yang menghambat pertumbuhan akar mangrove dan binatang yang merusak bibit mangrove menjadi perhatian utama. Masyarakat dan pemerintah telah berperan aktif dalam edukasi lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengawasan untuk mengatasi masalah ini. Kesadaran masyarakat yang meningkat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini.

Dari sisi ekonomi, menunjukkan dampak positif dan negatif dari pengelolaan mangrove terhadap masyarakat pesisir. Pengelolaan yang baik meningkatkan kesadaran akan pentingnya mangrove dan memperbaiki kondisi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya mangrove secara berkelanjutan. Namun, kebijakan konservasi seperti yang diterapkan melalui kebijakan adat Papadak memberikan tekanan ekonomi pada masyarakat yang masih bergantung pada mangrove sebagai mata pencaharian.

Untuk mencapai keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Edukasi yang lebih kuat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memastikan ekosistem mangrove tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Struktur(*Structure*) pengelolaan mangrove di Pantai Litianak menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat. Model kelembagaan tiga pilar ini menjadi fondasi penting dalam konservasi mangrove yang berkelanjutan. Lembaga lokal seperti Kelompok Adat Welaleo telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan himbauan. Komunitas masyarakat aktif dalam kegiatan seperti penanaman ulang mangrove, yang menunjukkan partisipasi tinggi dalam pengelolaan.

Namun, keterbatasan partisipasi masyarakat dan sumber daya di BUMDes menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Upaya peningkatan sumber daya, edukasi lingkungan, dan penguatan kerjasama antar lembaga akan memperkuat struktur kelembagaan yang ada.

Kebijakan adat seperti Papadak memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan sumber daya mangrove, dengan sanksi adat berupa denda dan hukuman penjara, yang berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Perilaku(*Behavior*) masyarakat menunjukkan adanya kesadaran tinggi terhadap pentingnya mangrove. Kegiatan seperti penanaman ulang dan pemanfaatan hasil hutan secara bijak menjadi praktik umum di Pantai Litianak. Namun, ketidakpastian akses masyarakat terhadap hasil mangrove menjadi penghambat partisipasi aktif. Dengan memperjelas kebijakan akses dan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui edukasi, pengelolaan mangrove dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah menunjukkan sikap tegas dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove melalui kebijakan adat Papadak. Dukungan pemerintah berhasil mengurangi praktik eksploitasi ilegal dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan konservasi tidak merugikan aspek ekonomi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan alternatif ekonomi akan memastikan kelestarian mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja(*Performance*)Upaya restorasi dan pelestarian mangrove di Pantai Litianak telah berhasil dengan baik. Program penanaman ulang pohon mangrove yang melibatkan masyarakat pesisir dan kelompok adat telah memperbaiki kondisi ekosistem mangrove secara signifikan. Masyarakat yang tidak lagi menebang pohon secara sembarangan dan berhasil meningkatkan ekonomi mereka menunjukkan dampak positif dari program tersebut.

Kesadaran masyarakat yang tinggi, didukung oleh pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok adat, menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan ini. Penguatan pengawasan, edukasi lingkungan, dan pengembangan ekonomi berbasis mangrove akan memastikan bahwa keberhasilan ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa depan.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan hutan mangrove di Pantai Litianaka, Desa Holulai, menunjukkan pentingnya kelembagaan lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya hutan mangrove. Pengelolaan yang dilakukan di desa ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat, yang bersama-sama membentuk sistem yang

terkoordinasi untuk menjaga kelestarian mangrove serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Situasi Pengelolaan hutan mangrove di Pantai Litianak tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-ekologis masyarakat pesisir. Masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, perubahan lingkungan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Dalam situasi ini, kebutuhan untuk melestarikan mangrove sekaligus memperoleh manfaat ekonomi mendorong terbentuknya kelembagaan lokal yang responsif dan adaptif terhadap kondisi sekitar.

Struktur kelembagaan di Pantai Litianak terdiri atas perpaduan lembaga formal dan non-formal. Lembaga formal seperti Pemerintah Desa, BUMDes, dan KPH berperan dalam hal legalitas, koordinasi lintas sektor, serta akses program bantuan. Sementara itu, lembaga adat seperti Welaleo dan tokoh adat Maneleo berfungsi sebagai penjaga norma dan hukum adat, termasuk pelaksanaan sanksi adat Hoholok bagi pelanggar. Struktur kelembagaan ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara nilai-nilai adat dan aturan negara.

Perilaku Kelembagaan dan Masyarakat Melalui sosialisasi, edukasi, dan pendekatan partisipatif, terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan hutan mangrove — dari sebelumnya bersifat eksploitatif menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada konservasi. Mekanisme sosial seperti gotong royong, pengawasan bersama, dan pemberlakuan sanksi adat turut memperkuat norma kolektif dalam menjaga kelestarian mangrove. Selain itu, pemanfaatan hasil hutan mangrove secara lestari (seperti madu mangrove dan wisata edukatif) memperlihatkan orientasi ekonomi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Kinerja kelembagaan lokal dapat dinilai dari keberhasilan mereka dalam melakukan rehabilitasi kawasan mangrove, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga tatanan sosial. Dalam hal ini, fungsi koordinasi, komunikasi, serta monitoring yang dilakukan oleh para aktor kelembagaan terbukti efektif. Kolaborasi antara institusi negara dan adat menjadi pilar penting dalam menghasilkan tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan adil. Secara keseluruhan studi ini memperkuat teori Ostrom mengenai efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya bersama, sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengelolaan berbasis komunitas dapat menjadi alternatif berkelanjutan dalam konteks pengelolaan ekosistem pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., & Rachman, A. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove di pesisir utara Jawa. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.24198/jsh.2.1.29-36>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2000). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Jogja Offset.
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan hutan mangrove di Indonesia 2022*. Jakarta: BRGM.
- Bakker, K. (2003). *An uncooperative commodity: Privatizing water in England and Wales*. Oxford University Press.
- Bengen, D. G. (2008). *Ekosistem dan sumberdaya alam pesisir dan laut serta prinsip pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Blaikie, P. (1985). The political economy of soil erosion in developing countries. *Review of African Political Economy*, 33, 113–115.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (2000). *Third World political ecology*. London & New York: Routledge.
- Cholis, M., & Sukmawati, A. (2021). Strategi adaptasi perubahan iklim melalui rehabilitasi hutan mangrove. *Jurnal Kehutanan dan Lingkungan*, 8(2), 133–142. <https://doi.org/10.22146/jkl.71543>
- Duhari, R. (2001). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. PT.
- Fischer, F. (2000). *Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge*. Duke University Press.
- Gunawan, J., & Supriyadi, S. (2023). Problematika pengelolaan hutan adat melalui perhutanan sosial berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2).
- Hoffman, A. J. (2001). Linking social science and ecological economics. In R. Costanza (Ed.), *Ecological Economics* (pp. xx–xx). Island Press. (halaman perlu ditambahkan jika diketahui)
- Ifandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30–41. <https://doi.org/10.23960/jsl1730-41>
- Kementerian Kehutanan. (2013). *Luasan hutan mangrove di Indonesia*. Diakses 4 April 2014, dari <http://kementeriankehutanan.com>
- Marsudi, B., Satjapradja, O., & Salampessy, L. M. (2018). Komposisi jenis pohon dan struktur tegakan hutan mangrove. *Jurnal Belantara*, 1(2), 115–122.

- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). *The limits to growth*. New York: Universe Books.
- Muhaerin, M. (2008). Kajian sumberdaya ekosistem mangrove untuk pengelolaan ekowisata di Estuari Perancak, Jembrana, Bali (Tesis, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor).
- Mukti, A., & Saputra, E. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di pesisir timur Sumatera. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(4), 210–219. <https://doi.org/10.29244/jpb.7.4.210-219>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pradnya Paramita. (2017). *Miliki 23% ekosistem mangrove dunia, Indonesia tuan rumah konferensi internasional mangrove 2017*. Kementerian LHK. Diakses 6 Februari 2018 dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561
- Puspita, D., & Herlina, L. (2022). Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Konservasi Sumberdaya Alam*, 18(3), 189–198. <https://doi.org/10.14710/jksa.18.3.189-198>
- Rahim, S., & Baderan, D. W. K. (2017). *Hutan mangrove dan pemanfaatannya*. Yogyakarta: Deepublish.